

PERANCANGAN KANTOR PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT BERBASIS ARSITEKTUR POST-MODERN DI MANOKWARI

Maikelson Sabedeus Isba¹, Ayesha Aramita L. Malonda², Karry E.H. Umboh³

¹Teknik Arsitektur, Teknik, Universitas Nusantara Manado

²Teknik Arsitektur, Teknik, Universitas Nusantara Manado

³Teknik Arsitektur, Teknik, Universitas Nusantara Manado

¹maikelson@nusantara.ac.id, ²ayasha@nusantara.ac.id, ³karry@nusantara.ac.id

Abstrak

Perkembangan institusi hukum di Indonesia menuntut adanya fasilitas bangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga mampu merepresentasikan nilai-nilai keadilan dan identitas lokal. Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan, sehingga membutuhkan fasilitas Kantor Pengadilan Tinggi yang representatif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang Kantor Pengadilan Tinggi Papua Barat dengan pendekatan arsitektur postmodern yang mampu mengintegrasikan fungsi, estetika, dan nilai budaya lokal. Metode yang digunakan adalah metode perancangan arsitektur melalui tahapan pengumpulan data, analisis kebutuhan ruang, analisis tapak, serta pengembangan konsep desain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan arsitektur postmodern mampu menghasilkan desain bangunan yang komunikatif, simbolis, serta kontekstual terhadap budaya lokal Papua Barat. Bangunan yang dirancang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas hukum, tetapi juga sebagai representasi visual keadilan dan identitas daerah.

Kata kunci: perancangan kantor, Pengadilan Tinggi, arsitektur postmodern, desain arsitektur, Papua Barat

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari segi regulasi maupun kelembagaan. Dalam konteks tersebut, keberadaan fasilitas fisik berupa bangunan lembaga hukum memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan tingkat banding memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan, sehingga memerlukan fasilitas yang tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional tetapi juga mampu merepresentasikan nilai-nilai hukum secara visual.

Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Secara geografis, wilayah ini memiliki luas sekitar 3.168,28 km² dengan letak astronomis antara 0°15'–3°25' Lintang Selatan dan 132°35'–134°45' Bujur Timur. Posisi ini menjadikan Manokwari sebagai pusat administrasi, ekonomi, dan sosial di wilayah Papua Barat.

Namun demikian, fasilitas gedung lembaga hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu merepresentasikan nilai keadilan secara arsitektural. Bangunan cenderung bersifat fungsional semata tanpa mempertimbangkan aspek estetika, simbolisme, dan konteks budaya lokal. Hal ini

menyebabkan bangunan tidak memiliki karakter yang kuat sebagai simbol keadilan.

Pendekatan arsitektur postmodern dipilih sebagai solusi dalam perancangan ini karena mampu mengintegrasikan berbagai elemen desain, termasuk simbolisme, warna, ornamen, dan konteks budaya. Arsitektur postmodern memungkinkan bangunan untuk memiliki identitas yang kuat sekaligus tetap memenuhi fungsi utamanya sebagai fasilitas hukum.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merancang Kantor Pengadilan Tinggi Papua Barat yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika dan simbolisme yang kuat melalui pendekatan arsitektur postmodern.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan ini adalah metode perancangan arsitektur yang terdiri dari beberapa tahapan utama yang saling terintegrasi. Tahapan tersebut meliputi pengumpulan data, analisis, sintesis, serta pengembangan konsep desain.

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap kondisi tapak dan lingkungan sekitar, sedangkan data sekunder diperoleh dari

Archplano (Vol. 2 No. 1, September 2026)

E-ISSN: 3124-503X

studi literatur, regulasi, serta referensi terkait perancangan bangunan pengadilan.

Tahap analisis dilakukan secara komprehensif meliputi analisis kebutuhan ruang, analisis manusia, analisis lingkungan, serta analisis bangunan. Analisis kebutuhan ruang bertujuan untuk menentukan jenis dan jumlah ruang yang diperlukan berdasarkan aktivitas pengguna. Analisis manusia mencakup identifikasi pengguna bangunan seperti hakim, pegawai, dan masyarakat umum.

Analisis lingkungan mencakup kajian terhadap kondisi fisik tapak seperti topografi, iklim, orientasi matahari, arah angin, serta tingkat kebisingan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa desain bangunan dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan.

Selanjutnya, analisis bangunan dilakukan untuk menentukan sistem struktur, material, utilitas, serta sistem sirkulasi dalam bangunan. Sistem sirkulasi dirancang agar mampu mendukung efisiensi pergerakan serta keamanan pengguna.

Tahap sintesis dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh hasil analisis ke dalam konsep desain. Pada tahap ini, pendekatan arsitektur postmodern diterapkan melalui eksplorasi bentuk, penggunaan ornamen, serta pengolahan warna dan material.

Tahap akhir adalah pengembangan desain yang meliputi penyusunan site plan, gubahan massa bangunan, serta visualisasi desain secara keseluruhan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perancangan Kantor Pengadilan Tinggi Papua Barat merupakan sintesis dari seluruh proses analisis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pembahasan ini tidak hanya menyajikan bentuk akhir desain, tetapi juga menjelaskan hubungan antara kebutuhan ruang, kondisi tapak, pendekatan arsitektur postmodern, serta sistem struktur dan utilitas bangunan secara komprehensif.

3.1 Analisis Kebutuhan Ruang dan Program Bangunan

Analisis kebutuhan ruang dilakukan berdasarkan aktivitas pengguna yang terdiri dari hakim, pegawai, pengunjung, serta pihak terkait lainnya dalam proses peradilan. Setiap kelompok pengguna memiliki kebutuhan ruang yang berbeda sehingga diperlukan pengelompokan ruang yang jelas untuk mendukung efisiensi dan keamanan.

Analisis kebutuhan ruang dilakukan berdasarkan aktivitas pengguna yang terdiri dari hakim, pegawai, pengunjung, serta pihak terkait lainnya dalam proses

peradilan. Setiap kelompok pengguna memiliki kebutuhan ruang yang berbeda sehingga diperlukan pengelompokan ruang yang jelas untuk mendukung efisiensi dan keamanan.

Tabel 1. Kebutuhan Ruang dan luasan

Jenis Ruang	Luas (m ²)	Fungsi
Ruang Sidang Utama	300	Persidangan utama
Ruang Hakim	100	Aktivitas hakim
Ruang Administrasi	150	Pengelolaan dokumen
Ruang Tunggu	200	Pengunjung
Ruang Arsip	120	Penyimpanan dokumen

Hubungan antar ruang dirancang dengan mempertimbangkan tingkat privasi dan keamanan. Ruang sidang ditempatkan pada zona semi publik, sedangkan ruang hakim berada pada zona privat yang memiliki akses terbatas.

3.2 Analisis Tapak dan Lingkungan

Analisis tapak menunjukkan bahwa lokasi perancangan memiliki potensi strategis dengan aksesibilitas yang baik serta kondisi lingkungan yang mendukung. Secara geografis, wilayah Manokwari memiliki karakteristik iklim tropis dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi serta curah hujan yang signifikan.

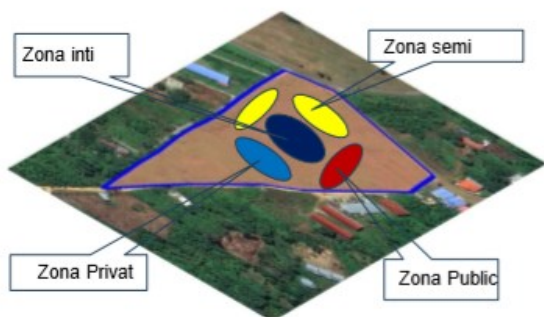
Orientasi bangunan dirancang untuk memaksimalkan pencahayaan alami dengan memanfaatkan arah timur dan barat. Selain itu, bukaan bangunan dirancang untuk mendukung ventilasi silang sehingga dapat meningkatkan kenyamanan termal di dalam ruang.

Analisis kebisingan dilakukan untuk mengidentifikasi sumber gangguan suara dari lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil analisis, ruang sidang ditempatkan pada area yang relatif tenang untuk menjaga kualitas akustik selama proses persidangan berlangsung.

3.3 Analisis Zonasi dan Sirkulasi

Zonasi bangunan dibagi menjadi empat bagian utama, yaitu zona publik, zona semi publik, zona privat, dan Zona Inti. Zona publik mencakup area yang dapat diakses oleh masyarakat umum seperti ruang tunggu dan area pelayanan. Zona semi publik mencakup ruang sidang, Zona inti adalah Gedung kantor pengadilan tinggi, sedangkan zona privat mencakup ruang hakim dan ruang administrasi.

Gambar 1. Zonasi Bangunan



Sistem sirkulasi dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi dan keamanan. Jalur sirkulasi dibedakan antara pengunjung, pegawai, dan hakim untuk menghindari konflik pergerakan.

Gambar 2. Sirkulasi Pengguna



Sirkulasi vertikal menggunakan tangga dan lift yang ditempatkan pada titik strategis untuk memudahkan akses antar lantai. Sementara itu, sirkulasi horizontal dirancang melalui koridor yang menghubungkan setiap ruang secara efisien.

3.4 Konsep Gubahan Massa Bangunan

Gubahan massa bangunan merupakan hasil transformasi dari konsep arsitektur postmodern yang menggabungkan elemen modern dan tradisional. Bentuk bangunan dirancang dengan mempertimbangkan fungsi, estetika, serta konteks lingkungan.

Transformasi bentuk dilakukan melalui eksplorasi geometris yang menghasilkan komposisi massa yang dinamis dan tidak monoton. Pendekatan ini memungkinkan bangunan memiliki karakter visual yang kuat sekaligus tetap fungsional.

Gambar 3. Gubahan Massa Bangunan



3.5 Analisis Struktur Bangunan

Struktur bangunan dirancang untuk mendukung bentuk arsitektur yang kompleks sekaligus memastikan kestabilan dan keamanan bangunan. Sistem struktur utama menggunakan rangka beton bertulang yang dikombinasikan dengan elemen struktur baja pada bagian tertentu.

Pemilihan sistem struktur ini didasarkan pada kebutuhan bentang ruang yang luas, khususnya pada ruang sidang utama yang membutuhkan ruang tanpa kolom di tengah. Struktur atap dirancang dengan sistem rangka baja ringan untuk mengurangi beban bangunan.

3.6 Analisis Material Bangunan

Material yang digunakan dalam perancangan ini dipilih berdasarkan pertimbangan ketahanan terhadap kondisi iklim tropis, estetika, serta kesesuaian dengan konsep arsitektur postmodern. Material utama yang digunakan meliputi beton, kaca, dan logam.

Penggunaan kaca pada fasad bangunan bertujuan untuk memaksimalkan pencahayaan alami serta memberikan kesan transparansi yang mencerminkan nilai keterbukaan dalam sistem peradilan.

Archplano (Vol. 2 No. 1, September 2026)

E-ISSN: 3124-503X

Sementara itu, penggunaan elemen logam dan ornamen memberikan aksen visual yang khas.

3.7 Analisis Sistem Utilitas

Sistem utilitas bangunan meliputi sistem air bersih, sistem pembuangan limbah, sistem listrik, serta sistem keamanan. Sistem air bersih dirancang dengan menggunakan sumber air dari jaringan kota yang disalurkan ke dalam bangunan melalui sistem distribusi vertikal.

Sistem pencahayaan menggunakan kombinasi antara pencahayaan alami dan buatan. Pencahayaan alami dimanfaatkan melalui bukaan pada fasad bangunan, sedangkan pencahayaan buatan menggunakan lampu LED yang hemat energi.

Sistem keamanan dilengkapi dengan CCTV, sistem kontrol akses, serta sistem alarm untuk memastikan keamanan bangunan.

3.8 Pembahasan

Hasil perancangan menunjukkan bahwa pendekatan arsitektur postmodern mampu menghasilkan desain bangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional tetapi juga memiliki nilai simbolik yang kuat. Integrasi antara fungsi, estetika, dan konteks budaya menghasilkan bangunan yang representatif sebagai lembaga hukum.

Selain itu, penerapan sistem struktur dan utilitas yang tepat memastikan bahwa bangunan dapat berfungsi secara optimal dalam jangka panjang. Desain yang dihasilkan juga mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan serta memberikan kenyamanan bagi pengguna.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan Kantor Pengadilan Tinggi Papua Barat dengan pendekatan arsitektur postmodern, dapat disimpulkan bahwa proses desain yang dilakukan telah mampu menjawab kebutuhan fungsional, teknis, serta nilai simbolik bangunan sebagai lembaga peradilan.

Pertama, dari aspek kebutuhan ruang, perancangan telah mengakomodasi seluruh aktivitas utama pengguna bangunan, yaitu hakim, pegawai, dan masyarakat umum, melalui penyusunan program

ruang yang terstruktur. Pembagian ruang ke dalam zona publik, semi publik, dan privat terbukti efektif dalam menjaga efisiensi aktivitas serta tingkat keamanan, terutama dalam mendukung proses persidangan yang memerlukan kontrol akses yang ketat.

Kedua, dari aspek tapak dan lingkungan, desain bangunan telah mempertimbangkan kondisi geografis dan iklim Kota Manokwari. Orientasi bangunan, pengolahan bukaan, serta penempatan massa bangunan dirancang untuk memaksimalkan pencahayaan alami dan ventilasi silang, sehingga memberikan kenyamanan termal bagi pengguna sekaligus meningkatkan efisiensi energi bangunan.

Ketiga, dari aspek arsitektural, penerapan pendekatan arsitektur postmodern mampu menghasilkan bentuk bangunan yang tidak hanya fungsional tetapi juga komunikatif dan simbolis. Penggunaan elemen bentuk, ornamen, serta pengolahan fasad mencerminkan nilai keadilan, keterbukaan, dan kewibawaan lembaga hukum, sekaligus mengintegrasikan unsur budaya lokal Papua Barat sebagai identitas visual bangunan.

Keempat, dari aspek teknis bangunan, sistem struktur yang digunakan telah mampu mendukung kebutuhan ruang dengan bentang lebar, khususnya pada ruang sidang utama, sehingga tercipta fleksibilitas ruang tanpa hambatan visual. Pemilihan material yang sesuai dengan kondisi iklim tropis serta penerapan sistem utilitas yang efisien turut mendukung keberlanjutan dan kemudahan operasional bangunan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil perancangan menunjukkan bahwa pendekatan arsitektur postmodern dapat menjadi solusi yang efektif dalam merancang bangunan institusi publik yang tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga memiliki nilai estetika dan simbolik yang kuat. Dengan demikian, Kantor Pengadilan Tinggi Papua Barat yang dirancang diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas hukum, tetapi juga sebagai representasi keadilan serta ikon arsitektural yang kontekstual terhadap lingkungan dan budaya setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamson, G., & Pavitt, J. 2011. Postmodernism: Style and Subversion, 1970–90. London: V&A Publishing.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Provinsi Papua Barat dalam Angka 2022. Manokwari: BPS Papua Barat.
- Broadbent, G. 1973. Design in Architecture. New York: John Wiley & Sons.
- Classe, O. (Ed.). 2000. Encyclopedia of Literary Translation into English. London: Fitzroy Dearborn Publishers.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2022. Data Statistik Kependudukan Provinsi Papua Barat. Manokwari: Disdukcapil Papua Barat.
- Farrell, T., & Furman, A.N. 2017. Revisiting Postmodernism. London: RIBA Publishing.
- Frank, S. A. K. 2012. Arsitektur Tradisional Suku Arfak di Manokwari. Jayapura: Universitas Cenderawasih.
- Franklin, G., & Harwood, E. 2017. Post-Modern Buildings in Britain. London: Batsford.
- Ghirardo, D. 1996. Architecture after Modernism. London: Thames & Hudson.
- Gura, J. 2017. Postmodern Design Complete. London: Thames & Hudson.
- Jencks, C. 1977. The Language of Post-Modern Architecture. London: Academy Editions.
- Jencks, C. 1980. Post-Modern Classicism. London: Architectural Design.
- Jencks, C. 1991. Post-Modern Triumphs in London. London: Architectural Design.
- Jencks, C. 2011. The Story of Post-Modernism: Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical in Architecture. Chichester: Wiley.
- Jones, J. C. 1972. Design Methods. London: Wiley-Interscience.
- Kementerian PAN-RB. 2021. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Semarang. Jakarta: Kementerian PAN-RB.
- Klotz, H. 1988. The History of Postmodern Architecture. Cambridge, MA: MIT Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. Pedoman Standardisasi Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, Prototipe Gedung Kantor Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mediastika, E. C. 2005. Akustika Bangunan dan Prinsip-Prinsip Penerapannya. Jakarta: Erlangga.
- Neufert, E. 1996. Data Arsitek Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Neufert, E. 2002. Data Arsitek Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Noor, H. 2012. Kajian Pola Sirkulasi untuk Sektor Informal di Ruang Terbuka Publik Koridor Yos Sudarso Kota Palangkaraya. Palangkaraya: Universitas Palangka Raya.
- Ortony, A. 1993. Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press.